

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 14 Agustus 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Okezone.com	Jumat, 14 Agustus 2020	Bali Bakal Punya Bendungan Sekaligus Pembangkit Listrik Mikro Hydro pada 2022	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyelesaikan 65 bendungan yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Salah satu bendungan yang akan mulai dikerjakan adalah Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, Bali.</p> <p>https://economy.okezone.com/read/2020/08/13/320/2261507/bali-bakal-punya-bendungan-sekaligus-pembangkit-listrik-mikro-hydro-pada-2022</p> <p>https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5132382/bendungan-tamblang-bali-senilai-rp-769-m-mulai-dibangun?_ga=2.219399769.1147330029.1597369074-1745634070.1586912911</p>
2	Timesindonesia.com	Jumat, 14 Agustus 2020	Kementerian PUPR RI Dorong Generasi Milenial Tinggal di Hunian Vertikal	<p>Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus berupaya untuk menyediakan rumah sebagai kebutuhan pokok, disamping sandang dan pangan, bagi masyarakat Indonesia melalui Program Satu Juta Rumah (PSR). Salah satunya dengan terus mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan sehingga para generasi milenial dapat memiliki hunian pertama yang sehat, berkualitas, nyaman dan dengan harga yang terjangkau melalui berbagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/290794/kementerian-pupr-ri-dorong-generasi-milenial-tinggal-di-hunian-vertikal</p>
3	Antarane.ws.com	Jumat, 14 Agustus 2020	Kementerian PUPR bangun kembali Pasar Legi di Ponorogo	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah melakukan rekonstruksi atau membangun kembali Pasar Legi di Ponorogo, Jawa Timur, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.</p> <p>https://www.antarane.ws.com/berita/1666178/kementerian-pupr-bangun-kembali-pasar-legi-di-ponorogo</p>
4	Tribunnews.com	Jumat, 14 Agustus 2020	Sarkawi dan Kementerian PUPR Bahas Jembatan Enang-Enang	<p>Bupati Bener Meriah, Abuya Tgk H Sarkawi melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Pembangunan Jembatan, Ir Yudha Handita Pandjiriawan MT MBA, dalam rangka percepatan proses desain pembangunan jembatan Enang-Enang yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2020).</p> <p>https://aceh.tribunnews.com/2020/08/13/sarkawi-dan-kementerian-pupr-bahas-jembatan-enang-enang</p>
5	Merdeka.com	Jumat, 14 Agustus 2020	Kementerian PUPR Gelontorkan Rp10,8 Miliar Bangun Stadion Mini di Solo	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,8 miliar untuk membangun stadion mini di Kampung Cengklik, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo. Anggota Komisi II DPRD Kota Solo melakukan inspeksi di lokasi proyek, Kamis (13/9).</p> <p>https://www.merdeka.com/peristiwa/kementerian-pupr-gelontorkan-rp108-miliar-bangun-stadion-mini-di-solo.html</p>
6	Beritadaerah.co.id	Jumat, 14 Agustus 2020	Tahun 2020, Kementerian PUPR Bangun 350 Unit Rusus Bagi Nelayan	<p>Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerjakan pembangunan infrastruktur yakni membangun rumah khusus (Rusus) bagi nelayan sebanyak 350 unit yang tersebar di 9 provinsi. Pembangunan ini sebagai upaya</p>

				<p>pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan di Indonesia.</p> <p>https://www.beritadaerah.co.id/2020/08/14/tahun-2020-kementerian-pupr-bangun-350-unit-rumah-khusus-nelayan/</p>
7	Bisnis Indonesia (Halaman 4)	Jumat, 14 Agustus 2020	Memikat Swasta Berperan Ekstra	<p>Di tengah beban APBN yang makin berat, isu klasik seputar optimasi peran swasta dalam pendanaan infrastruktur nasional justru tak kunjung tertuntaskan. Profi tabilitas proyek yang ditenderkan pun sudah saatnya dibenahi. Terkait dengan problem itu, ekonom Center of Reform on Economic Muhammad Faisal menyarankan pemerintah segera meramu strategi jitu untuk mendorong keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional (PSN).</p>
8	Bisnis Indonesia, Halaman Utama	Jumat, 14 Agustus 2020	Swasta Kuasai Infrastruktur	<p>Kontribusi swasta bakal membesar dalam proyek infrastruktur setelah 5 tahun sebelumnya didominasi oleh BUMN. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, porsi pembiayaan dari swasta diharapkan mencapai Rp2.706 triliun atau 42% dari total anggaran pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp6.445 triliun. Kerangka pendanaan itu berubah drastis. Pada RPJMN 2015—2019, pemerintah lewat APBN mengambil porsi terbesar dengan kontribusi 41%, disusul swasta 37% dan BUMN 22%. Sementara itu, dari sisi anggaran, kebutuhan pembiayaan infrastruktur juga naik 34,38% dari anggaran pada 5 tahun sebelumnya senilai Rp4.796 triliun.</p>
9	Media Indonesia, Halaman A12	Jumat, 14 Agustus 2020	Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut	<p>Fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawaasan strategis. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid -19. "Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tegas presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7). Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan.</p>

Judul	Swasta Kuasai Infrastruktur	Tanggal	14 Agustus 2020
Media	Bisnis Indonesia (Halaman Utama)		
Resume	Kontribusi swasta bakal membesar dalam proyek infrastruktur setelah 5 tahun sebelumnya didominasi oleh BUMN. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, porsi pembiayaan dari swasta diharapkan mencapai Rp2.706 triliun atau 42% dari total anggaran pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp6.445 triliun.		

SWASTA KUASAI INFRASTRUKTUR

Kontribusi swasta bakal membesar dalam proyek infrastruktur setelah 5 tahun sebelumnya didominasi oleh BUMN.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, porsi pembiayaan dari swasta diharapkan mencapai Rp2.706 triliun atau 42% dari total anggaran pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp6.445 triliun.

Kerangka pendanaan itu berubah drastis. Pada RPJMN 2015–2019, pemerintah lewat APBN mengambil porsi terbesar dengan kontribusi 41%, disusul swasta 37% dan BUMN 22%.

Sementara itu, dari sisi anggaran, kebutuhan pembiayaan infrastruktur juga naik 34,38% dari anggaran pada 5 tahun sebelumnya senilai Rp4.796 triliun.

Untuk 5 tahun ke depan, swasta diproyeksikan bakal mendominasi melalui skema kerja sama pemerintah



INDONESIA MAJU

dengan badan usaha. Upaya untuk mendorong peran swasta dalam proyek-proyek infrastruktur itu pun menjadi relevan di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai. Pasalnya, pemerintah bakal makin selektif untuk membelanjakan uangnya, apalagi jika tidak terkait langsung dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN).

Di sisi lain, meningkatkan keterlibatan swasta tidak akan mudah karena sektor privat juga turut terdampak pandemi. Alhasil, investasi pun bakal dilakukan secara lebih hati-hati dan cenderung diarahkan pada proyek dengan profil risiko yang rendah.

Dengan kondisi tersebut, iklim investasi

yang positif serta kepastian usaha di bidang infrastruktur perlu dijaga dan ditingkatkan. Pemberian stimulus fiskal dan nonfiskal yang tepat diharapkan jadi pemanis yang mampu menarik minat investor swasta.

Baca Selengkapnya:
Emiten BUMN 'Serbu' Proyek ▶▶ 3
Memikat Swasta Berperan Ekstra ▶▶ 4



Perbandingan Stok Infrastruktur (% PDB)

Afrika Selatan	87
Italia	82
Polandia	80
China	76
Spanyol	73
Jerman	71
Amerika Serikat	64
India	58
Kanada	58
Ingris Raya	57
Indonesia	43

Pemanfaatan Pendanaan Infrastruktur 2020–2024

Sumber Pendanaan	Arah Pemanfaatan
Swasta	Infrastruktur mendukung ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur TIK
Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	
BUMN/BUMD	
APBN/APBD	Infrastruktur pelayanan dasar

Alokasi Pembiayaan Infrastruktur

2010–2014 Rp679 triliun
2015–2019 Rp1.820 triliun

Visi Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR 2020–2024

- Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m³/kapita/tahun. **Anggaran: Rp577 triliun**
- Jalan mantap 97%, jalan tol 1.500 km, jalan baru 2.500 km, jembatan baru/FO 60.000 m. **Anggaran: Rp330 triliun**
Investasi: Rp243 triliun
- 88% air minum, 17.000 ha kumuh, 85% sanitasi. **Anggaran: Rp128 triliun**
- 5 juta *backlog* MBR, pembangunan 3,9 juta unit. **Anggaran: Rp780 triliun** (20%–30% APBN/APBD, 70%–80% swasta/masyarakat)

Sumber: RPJMN 2020–2024 dan berbagai sumber



Judul	Memikat Swasta Berperan Ekstra	Tanggal	14 Agustus 2020
-------	--------------------------------	---------	-----------------

Media	Bisnis Indonesia, Halaman 4
Resume	Di tengah beban APBN yang makin berat, isu klasik seputar optimasi peran swasta dalam pendanaan infrastruktur nasional justru tak kunjung tertuntaskan. Profi tabilitas proyek yang ditenderkan pun sudah saatnya dibenahi.

| PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR |

MEMIKAT SWASTA BERPERAN EKSTRA

Bisnis, JAKARTA — Di tengah beban APBN yang makin berat, isu klasik seputar optimasi peran swasta dalam pendanaan infrastruktur nasional justru tak kunjung tertuntaskan. Profitabilitas proyek yang ditenderkan pun sudah saatnya dibenahi.

Yanita Petriella & Arif Gunawan
redaksi@bisnis.com

Terkait dengan problem itu, ekonom Center of Reform on Economic Muhammad Faisal menyarankan pemerintah segera meramu strategi jitu untuk mendorong keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional (PSN). Dengan kata lain, lanjutnya, pemerintah harus memastikan PSN yang memiliki profitabilitas atau kelayakan finansial diprioritaskan bagi pemrakarsa swasta. Sebaliknya, PSN yang memiliki risiko tinggi diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). “Sebab, swasta tidak akan mau investasi ke proyek yang profitabilitasnya rendah. Apalagi, jika risikonya relatif tinggi,” ujarnya, Kamis (13/8).

Namun demikian, Faisal tak memungkiri dalam kondisi ekonomi yang tengah terpaar pandemi Covid-19, tantangan untuk melibatkan swasta dalam PSN sangat berat. Pasalnya, arus kas pelaku industri di Tanah Air juga sedang terganggu.

Untuk itu, solusi lain yang disarankan adalah terus menggalakkan pola kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau *blended finance*. “Terlebih, dalam situasi terbatasnya APBN di tengah pandemi. Cara lain enggak ada. Hanya itu,” tegasnya.

Sekadar catatan, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 menetapkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp6.445 triliun, dengan rincian APBN sebesar 37% atau Rp2.385 triliun, BUMN 21% atau Rp1.353 triliun, dan swasta 42% atau Rp2.707 triliun.

Dari RPJMN itu, pemerintah mengharapkan partisipasi swasta lebih besar dari BUMN maupun APBN. Pada periode RPJMN 2015—2019, penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur menembus 41% dan BUMN 22%, sedangkan swasta hanya 37%.

Pada perkembangan lain, pemerintah juga didesak menggelorakan proyek infrastruktur skala kecil dan menengah—seperti rumah sakit atau SPAM—dengan skema KPBU agar swasta mau terlibat.

Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan selama ini proyek KPBU cenderung bernilai besar. Namun, jumlah yang dilelang sangat sedikit sehingga sulit bagi swasta untuk berpartisipasi.

“Jadi, untuk konsultan proyek yang dilelang hanya 2—3 proyek saja dan nilainya besar. Tentunya, konsultan yang dipilih juga besar. Anggota Inkindo jarang yang terlibat karena kebanyakan skalanya menengah dan kecil,” sebutnya.

Dia berpendapat pembangunan infrastruktur melalui KPBU me-

mang diperlukan karena keterbatasan kapasitas APBN/APBD. Dengan skema KPBU, infrastruktur yang belum dapat diwujudkan melalui anggaran negara dan daerah dapat dipercepat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat segera terwujud.

Selain itu, sambungnya, skema KPBU memberikan nilai tambah bagi proyek infrastruktur, karena adanya pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan BUMN atau swasta.

Menurutnya, isu yang perlu dipahami pemerintah adalah memastikan proyek yang ditawarkan untuk KPBU layak secara ekonomi dan finansial alias memiliki profitabilitas.

Proyek yang layak secara ekonomi dan finansial tersebut dapat diinisiasi dan diprakarsai oleh badan usaha sendiri atau yang dikenal dengan skema KPBU *unsolicited*. Hal tersebut menandakan proyek tersebut menarik bagi badan usaha. “Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan seperti *viability gap fund* demi meningkatkan kelayakan proyek, penjaminan infrastruktur melalui PT PII, dan fasilitas dana pengadaan tanah,” tuturnya.

Senada, Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai proyek KPBU biasanya mewajibkan modal besar dan ini hanya dimiliki oleh perusahaan konstruksi skala besar. “Di Gapensi itu sekitar 95% adalah kontraktor skala kecil menengah atau UKM. Skema KPBU ini bisa berdampak ganda bila kontraktor swasta kecil menengah turut aktif dilibatkan,” ujarnya.

KENDALA UTAMA

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudyono mengaku salah satu kendala utama yang disoroti pelaku bisnis infrastruktur adalah tingginya biaya pendanaan (*cost of fund*) proyek. Padahal, lanjutnya, pemerintah sudah menggerojok aneka stimulus untuk membantu arus kas swasta.

“Sayangnya, dengan biaya pendanaan yang masih tinggi semacam saat ini, dunia usaha juga masih ragu untuk memanfaatkan [stimulus]-nya. Ini yang sedang terjadi, termasuk di industri infrastruktur,” ujarnya.

Dia mengibaratkan kondisi saat ini seperti orang yang sedang bergelut mencari likuiditas. Tanpa disadari, sebenarnya sedang duduk di tumpukan uang. Menurutnya, stimulus fiskal maupun moneter adalah bagian dari upaya pemerintah memaksimalkan peran swasta dalam menjalankan proyek nasional.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi tersebut justru bisa menjadi momentum pemerintah untuk

CARI INVESTOR PEMBANGUNAN

Pemerintah dalam RPJMN 2020–2024 menetapkan anggaran pembangunan infrastruktur senilai Rp6.445 triliun, dengan rincian APBN sebesar 37% atau Rp2.385 triliun, BUMN 21% atau Rp1.353 triliun, dan swasta 42% atau Rp2.707 triliun. Dari RPJMN ini, pemerintah mengharapkan partisipasi swasta lebih besar dari BUMN dan dari anggaran negara.

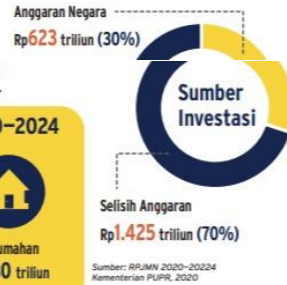
Perkembangan Terakhir Penawaran KPBU

- 21 November 2019:**
 - Sebanyak 4 proyek yang ditawarkan.
 - Penawaran proyek : Tol Solo–Yogyakarta–Kulonprogo, tol Yogyakarta–Bawen, tol Gedebage–Tasikamala–Cilacap, dan tol Mamminasata.
- 11 Maret 2020:**
 - Sebanyak 5 proyek yang ditawarkan.
 - Penawaran proyek : Sistem transaksi tol nontunai berbasis *Multi Lane Free Flow* (MLFF), tol layang Cikunir–Karawaci, preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, tol Kamal–Teluk–Naga–Rajej, dan tol Bogor–Serpong via Parung.

30 April 2019:

- Sebanyak 6 proyek yang ditawarkan.
- Penawaran proyek : Tol Semanan–Balaraja, tol layang Cikunir–Ulujami, tol Sentul Selatan–Karawang Barat, tol Akses Patimban, tol Semarang Harbour, dan jembatan Batam–Bintan.

Kebutuhan Investasi Kementerian PUPR TA 2020–2024



membuktikan masih baiknya iklim investasi dan kepastian dunia usaha sektor infrastruktur.

“Tentu, *willingness* ini bukan hanya harus ada, tetapi juga harus cepat agar tidak berakibat sistemik yang dapat menurunkan *appetite* investasi di proyek-proyek yang ditawarkan,” jelasnya.

Menurutnya, jaminan iklim investasi tersebut harus dilakukan segera. Jika tidak, proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan mengalami tantangan yang makin berat.

Kementerian PUPR dinilainya tidak cukup hanya menyampaikan daftar penawaran proyek, tetapi harus getol melakukan sosialisasi melalui media, *roadshow* ke berbagai investor potensial, dan memastikan *market sounding*.

“Tahapan *establishment* model KPBU menuju model bisnis yang *mature* di sektor jalan tol harus diselamatkan. Investasi swasta yang mengalami kelembaman kolaboratif akibat berbagai antededen proyek yang belum tuntas,

“Swasta tidak akan mau investasi ke proyek yang profitabilitasnya rendah.

model bisnis yang belum terbukti, serta isu keseimbangan kapabilitas kolaboratif di sisi pemerintah maupun swasta nasionalnya, harus menjadi prioritas untuk diselesaikan,” paparnya.

Dari sisi BUMN, Senior Executive Vice President PT Utama

Karya (Persero) Muhammad Fauzan menjelaskan ada sejumlah harapan agar para calon peserta lelang proyek KPBU mendapatkan informasi komprehensif tentang proyek terkait.

“Harapan kami agar proses *market sounding* proyek KPBU dapat berjalan baik dengan transparansi seluruh informasi yang berkaitan dengan legal, bisnis dan teknis yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga para calon peserta lelang proyek KPBU mendapatkan informasi yang komprehensif,” ujarnya.

Corporate Secretary PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Mahendra Vijaya menilai proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU adalah tawaran bisnis yang baik.

“WIKI cukup berminat dengan skema proyek-proyek tersebut. Tentunya, kami harus mengevaluasi terlebih dahulu skema KPBU yang ditawarkan, karena mungkin tiap proyek bisa berbeda-beda skemanya, porsi pendanaannya, dan lainnya,” sebutnya. ■

Judul	Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut	Tanggal	14 Agustus 2020
Media	Media Indonesia, Halaman A12		
Resume	Fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid-19. "Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tegas presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7). Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan.		

Pembangunan Infrastruktur Tetap Dikebut

Fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan kawasan-kawasan strategis.

SURYANI WANDARI PUTRI PERTIWI
wandari@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berjalan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur tidak boleh dilupakan di tengah penanganan pandemi covid-19. "Penanganan covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tegas Presiden Jokowi dalam unggahan video di akun media sosial resminya, Selasa (7/7).

Presiden Jokowi mencontohkan pembangunan tol berperan penting di masa pandemi covid-19 untuk menyuplai kebutuhan masyarakat dari bahan makanan hingga alat kesehatan. Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus megebut pembangunan ruas tol, bendungan, dan irigasi,



ANTARA/REPTIANDA PERDANA

PEMBANGUNAN TOL TRANS-SUMATRA: Pekerja PT Utama Karya menggunakan alat berat untuk menyelesaikan ruas tol di Gerbang Tol Tanjung Mulla Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/7). Pembangunan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,5 km yang merupakan bagian Tol Trans-Sumatra itu diharapkan menjadi roda penggerak ekonomi dan pariwisata di Sumatera Utara.

kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin untuk 2019-2024.

Selain tol, Kementerian PU-Pera membangun lima bendungan baru

Timur, Bendungan Jragung di Jawa Tengah, Bendungan Ameroro di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat.

"Pembangunan bendungan diikuti pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian,

bertujuan mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. Untuk pembangunan

triliun atau 21%, dan pihak swasta sebesar Rp2.707 triliun atau 42%.

Program padat karya

Selain sebagai proyek strategis, pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan mempertahankan

menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work agar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Hingga Juli 2020, Kementerian PU-Pera telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp4,8 triliun atau sebesar 42,7%.

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pemeliharaan rutin jalan & jembatan, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penataan Kota tanpa Kumuh (Kotaku), tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) dan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas), pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya.

Ekonom lembaga kajian Think Policy Society Adelia Surya Pratiwi menilai manfaat Program PKT seperti yang dilakukan Kementerian PU-Pera bisa langsung 'kembali ke rakyat' dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengatakan Program PKT kementerian/lembaga seperti dijalankan di Kementerian PU-Pera ialah program belanja modal yang sekaligus bertujuan menciptakan lapangan kerja. Seperti kita ketahui, belanja pemerintah yang langsung dimanfaatkan masyarakat ialah belanja subsidi dan bantuan sosial.

renovasi mulai beberapa pasar rakyat hingga beberapa destinasi wisata.

Basuki mengatakan fokus pembangunan Kementerian PU-Pera pada lima tahun ke depan ialah menghubungkan tol dengan

untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional, khususnya penyediaan air baku sebesar 54,81 m3/detik pada 2024, yakni Bendungan Tiu Suntuk di Nusa Tenggara Barat, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan

bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Menteri Basuki. Menurutnya, pengelolaan sumber daya air dan irigasi itu

infrastruktur sepanjang 2020-2024 tersebut, dibutuhkan dana sebanyak Rp6.445 triliun. Pemerintah hanya menanggung Rp2.385 triliun atau 37%, pendanaan BUMN (state owned enterprise/SOE) sebesar Rp1.353

daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi covid-19. Untuk proyek infrastruktur tersebut, pemerintah

"Untuk belanja lain seperti barang, modal, sebetulnya baik juga bila diarahkan ke penyerapan tenaga kerja karena manfaatnya bisa langsung 'kembali ke rakyat'," ujar Adelia saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (11/8). (E-3)